EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL
(Studi Partai Aceh Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Aceh Tengah)

Ghafara Sultan Fatwa
33.0018
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: ghafarasultanf@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si., M.H.
Email: tri.rahardjanto73@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Promblem Statment Research GAP: Previous studies on local political parties in Aceh have predominantly focused on post-conflict democratization, institutional development, and macro-level electoral trends at the provincial level. However, limited attention has been given to understanding the electoral decline and substantive existence of local political parties in heterogeneous regions with different socio-cultural characteristics, particularly in Central Aceh Regency, which is predominantly inhabited by the Gayo ethnic community. This gap becomes increasingly relevant considering the significant decline of the Aceh Party, which failed to secure any seats in the 2024 Regional House of Representatives (DPRK) election despite maintaining formal organizational legitimacy. ***Purpose:*** *This study aims to analyze the existence of the Aceh Party as a local political party in the 2024 Regional House of Representatives election in Central Aceh Regency, identify the factors influencing its existence, and examine the electoral dynamics from different perspectives.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with key informants and documentation studies based on official election documents and internal party reports. The analysis focuses on understanding the procedural and substantive dimensions of political party existence within the local electoral context.* ***Result:*** *This study found that procedurally, the Aceh Party in Central Aceh Regency continues to demonstrate strong organizational existence through administrative compliance and organizational structures extending to the village level.Electoral dynamics in Central Aceh indicate that voters increasingly prioritize practical needs and tangible policy outcomes over historical narratives and ideological romanticism. This condition is influenced by a psychological distance between the historical identity of the Aceh Party and the nationalist identity of the Gayo community, combined with shifts in voter behavior toward rational-pragmatic considerations, the influence of money politics, and strong political patronage from candidates of national political parties.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the existence of the Aceh Party in Central Aceh is currently at a critical transitional stage in which formal legitimacy no longer translates into electoral support. The party's effort to reconstruct its political narrative within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) has not been sufficient to gain support from increasingly rational and pragmatic voters.*

Keywords:
Aceh Party; Electoral Dynamics; Existence; Local Political Party; Voter Behavior

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai partai politik lokal di Aceh umumnya berfokus pada demokratisasi pasca-konflik, pelembagaan partai, dan dinamika elektoral pada tingkat provinsi atau wilayah basis utama partai lokal. Namun, masih terbatas penelitian yang mengkaji bagaimana eksistensi partai politik lokal berlangsung di wilayah dengan karakteristik sosial, budaya, dan perilaku pemilih yang berbeda, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah yang didominasi masyarakat Gayo. Kesenjangan ini menjadi penting mengingat Partai Aceh sebagai partai politik lokal terbesar di Aceh mengalami penurunan elektoral hingga tidak memperoleh kursi DPRK pada Pemilu 2024 meskipun secara organisasi masih mempertahankan keberadaan formalnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pemilu dan laporan internal partai. Analisis dilakukan untuk memahami eksistensi partai dari dimensi prosedural dan substantif dalam konteks dinamika politik lokal. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah masih memiliki eksistensi yang kuat melalui pemenuhan legalitas administrasi dan struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat kampung. Namun secara substantif, Partai Aceh mengalami kemunduran elektoral yang signifikan dengan kehilangan seluruh kursi di DPRK Aceh Tengah pada Pemilu 2024. Dinamika elektoral menunjukkan bahwa orientasi pemilih di Aceh Tengah cenderung bergeser pada kebutuhan praktis dan hasil nyata dibandingkan romantisasi sejarah maupun ideologi masa lalu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya jarak psikologis antara narasi historis Partai Aceh dengan identitas nasionalisme masyarakat Gayo, perubahan perilaku pemilih menjadi lebih rasional-pragmatis, pengaruh politik uang, serta kuatnya patronase politik dari calon legislatif partai nasional. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah berada pada fase transisi kritis, di mana legitimasi formal tidak lagi berbanding lurus dengan dukungan elektoral. Diperlukan redefinisi strategi kultural dan penguatan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik pemilih lokal agar partai politik lokal tetap relevan dalam kontestasi politik daerah.

Kata kunci: Dinamika Elektoral; Eksistensi; Partai Aceh; Partai Politik Lokal; Perilaku Pemilih

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah melalui proses representasi politik. Keberadaan partai politik tidak hanya menjadi sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme rekrutmen politik untuk menentukan aktor yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam negara demokratis, keberhasilan partai politik sering kali diukur dari kemampuannya mempertahankan legitimasi publik dan memenangkan kompetisi elektoral secara berkelanjutan. Namun, dalam perkembangan politik kontemporer, partai politik menghadapi tantangan berupa perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional dan pragmatis sehingga loyalitas terhadap identitas partai tidak lagi menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan partai politik lokal merupakan fenomena yang unik dan hanya ditemukan di Provinsi Aceh sebagai konsekuensi dari implementasi kekhususan daerah pasca penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Kesepakatan damai melalui Memorandum of Understanding Helsinki melahirkan pengaturan mengenai partai politik lokal yang kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kebijakan tersebut membuka ruang politik bagi masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal sebagai sarana partisipasi politik sekaligus sebagai instrumen transformasi perjuangan dari jalur konflik menuju jalur demokrasi.

Partai Aceh menjadi partai politik lokal yang paling dominan sejak pertama kali mengikuti Pemilu legislatif tahun 2009. Sebagai partai yang dibentuk oleh eks kombatan GAM, Partai Aceh berhasil memperoleh dukungan elektoral yang sangat kuat di berbagai wilayah Aceh dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik utama pada Pemilu 2014 dan 2019. Namun demikian, dominasi tersebut mulai menunjukkan kecenderungan menurun seiring berubahnya orientasi politik masyarakat dan meningkatnya persaingan dengan partai nasional. Penurunan perolehan kursi Partai Aceh tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, tetapi juga mulai terlihat secara signifikan pada tingkat kabupaten/kota.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian terjadi di Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Berdasarkan hasil pemilu, Partai Aceh tidak berhasil memperoleh satu kursi pun di DPRK Aceh Tengah meskipun pada periode sebelumnya masih memiliki representasi politik di parlemen daerah. Kondisi ini menjadi anomali mengingat Partai Aceh tetap merupakan partai lokal dengan jaringan organisasi yang relatif kuat serta memiliki legitimasi historis dalam politik Aceh. Di sisi lain, partai-partai nasional justru menunjukkan peningkatan pengaruh dan berhasil mendominasi distribusi kursi legislatif di wilayah tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan konfigurasi politik lokal yang tidak lagi bertumpu pada kedekatan historis maupun identitas politik semata. Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik sosial yang berbeda dibandingkan wilayah pesisir Aceh karena mayoritas masyarakatnya berasal dari etnis Gayo yang memiliki identitas budaya, orientasi politik, serta konstruksi nasionalisme yang khas. Perbedaan karakteristik ini diduga memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap narasi politik yang dibangun oleh Partai Aceh. Selain itu, meningkatnya pragmatisme politik, pengaruh patronase politik, kompetisi antar calon legislatif, serta orientasi masyarakat terhadap manfaat nyata dari kebijakan turut membentuk perilaku pemilih yang semakin rasional.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai partai politik lokal di Aceh sebagian besar berfokus pada pelembagaan demokrasi pasca-konflik, eksistensi partai lokal di tingkat provinsi, serta relasi antara partai lokal dan nasional. Namun, masih terbatas penelitian yang mengkaji

bagaimana eksistensi partai politik lokal berlangsung pada wilayah non-basis yang memiliki karakter sosial dan budaya berbeda seperti Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji, yaitu bagaimana sebuah partai politik lokal mempertahankan eksistensinya ketika berhadapan dengan perubahan perilaku pemilih dan dinamika elektoral yang semakin kompetitif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis eksistensi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian politik lokal serta memberikan gambaran empiris mengenai tantangan keberlanjutan partai politik lokal di daerah dengan karakteristik sosial-politik yang heterogen.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Eksistensi partai politik lokal merupakan salah satu karakteristik khusus dalam sistem politik di Aceh yang lahir dari proses transformasi politik pasca konflik dan pelembagaan perdamaian melalui jalur demokrasi. Kehadiran partai politik lokal pada awalnya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat representasi politik masyarakat Aceh sekaligus menjadi wadah artikulasi kepentingan daerah yang memiliki kekhususan historis dan sosial. Dalam praktiknya, keberhasilan partai politik lokal tidak hanya ditentukan oleh legalitas dan keberadaan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan dukungan elektoral di tengah perubahan perilaku politik masyarakat.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam perkembangan politik lokal Aceh terjadi pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang selama beberapa periode menjadi kekuatan dominan di Aceh mengalami penurunan dukungan secara signifikan hingga tidak memperoleh kursi DPRK. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik masyarakat yang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada identitas historis, kedekatan emosional terhadap narasi perjuangan, maupun legitimasi simbolik yang selama ini menjadi basis dukungan partai lokal.

Terdapat beberapa permasalahan yang diduga memengaruhi eksistensi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Pertama, adanya perubahan perilaku pemilih yang cenderung semakin rasional dan pragmatis dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat tidak lagi hanya mempertimbangkan identitas partai, tetapi lebih menekankan pada manfaat nyata, rekam jejak kandidat, kedekatan sosial, serta kemampuan menghadirkan solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, munculnya kompetisi politik yang semakin kuat dari partai nasional yang memiliki sumber daya organisasi, jaringan politik, dan strategi kampanye yang lebih adaptif terhadap perkembangan preferensi pemilih.

Selain itu, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh Tengah yang mayoritas berasal dari etnis Gayo juga menjadi faktor penting dalam dinamika tersebut. Secara historis dan kultural, masyarakat Gayo memiliki konstruksi identitas politik yang berbeda dibandingkan wilayah basis utama Partai Aceh. Perbedaan orientasi identitas ini berpotensi menciptakan jarak psikologis terhadap narasi historis yang selama ini dibangun oleh partai politik lokal. Di sisi lain, meningkatnya praktik patronase politik, pengaruh figur calon legislatif, serta kecenderungan politik transaksional turut memengaruhi pola partisipasi dan preferensi pemilih dalam kontestasi politik lokal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai partai politik lokal di Aceh, terutama terkait pelembagaan demokrasi pasca konflik, transformasi Gerakan Aceh Merdeka ke dalam sistem politik formal, dan dominasi elektoral Partai Aceh pada tingkat provinsi. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana eksistensi partai politik lokal dipertahankan atau mengalami penurunan

pada wilayah dengan karakter sosial, budaya, dan orientasi politik yang berbeda dari basis tradisionalnya.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian dalam studi ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menganalisis eksistensi Partai Aceh pada tingkat kabupaten melalui pendekatan yang menekankan hubungan antara perubahan perilaku pemilih, karakteristik identitas lokal, dan dinamika elektoral kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai eksistensi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Di wilayah seperti Kabupaten Aceh Tengah, yang secara sosiologis dan geografis memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dengan wilayah pesisir Aceh, Partai Aceh dituntut untuk tidak hanya menjual narasi perjuangan lokal atau kekhususan Aceh semata. Berdasarkan logika (Singh, 2026) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa keberhasilan eksistensi partai tersebut akan sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu menggeser atau menyelaraskan agenda politik mereka agar menjawab kebutuhan ekonomi riil dan stabilitas lokal yang menjadi prioritas utama masyarakat pemilih di Aceh Tengah pada Pemilu 2024. Argumen dari (Manwaring & Foley, 2026) dalam menganalisis dalam skripsi guna membedah eksistensi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilu DPRD 2024. dapat mengaitkannya dalam beberapa poin berikut:

1. Strategi Adaptasi Eksistensial: Seperti halnya pergeseran strategi Partai Buruh yang menjadi lebih moderat dan berhati-hati, Partai Aceh di Aceh Tengah kemungkinan juga melakukan pragmatisme politik atau penyesuaian isu kampanye demi merangkul pemilih heterogen dan menjaga eksistensinya di daerah yang secara historis bukan merupakan basis utama suara mereka.
2. Kerentanan di Balik Perolehan Kursi: Menggunakan kerangka berpikir, dapat menganalisis apakah raihan kursi Partai Aceh di DPRD Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilu 2024 benar-benar mencerminkan eksistensi yang kokoh, atau justru sebaliknya—menyembunyikan kerentanan internal (seperti penurunan loyalitas pemilih tradisional) akibat adanya fragmentasi politik baru di tingkat lokal.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat dinamika politik lokal di Aceh sedang mengalami perubahan yang signifikan, khususnya terhadap keberlangsungan eksistensi partai politik lokal dalam kontestasi demokrasi daerah. Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang selama ini menjadi simbol representasi politik masyarakat Aceh menghadapi tantangan berupa menurunnya dukungan elektoral pada sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Umum DPRD Tahun 2024. Fenomena hilangnya representasi Partai Aceh di DPRK Aceh Tengah menunjukkan adanya perubahan orientasi politik masyarakat yang perlu dipahami secara lebih mendalam agar tidak hanya dipandang sebagai penurunan suara elektoral semata, tetapi juga sebagai indikator perubahan hubungan antara partai politik lokal dengan basis sosial masyarakat.

Secara keilmuan, penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai eksistensi partai politik lokal dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan perilaku politik yang berbeda dari wilayah basis tradisional partai lokal di Aceh. Kajian mengenai partai politik lokal selama ini lebih banyak menyoroti aspek pelembagaan pasca-konflik dan dominasi politik pada tingkat provinsi, sementara penelitian mengenai keberlangsungan eksistensi partai lokal di wilayah non-basis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian politik lokal, perilaku pemilih, dan transformasi dukungan politik dalam sistem demokrasi daerah.

Argumen dari jurnal ini sangat tajam untuk membedah eksistensi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilu 2024. Sebagai partai lokal yang secara historis memiliki basis kultural kuat di wilayah pesisir, Partai Aceh menghadapi tantangan sosiologis yang berbeda di wilayah pedalaman seperti Aceh Tengah (masyarakat Gayo). Menggunakan kerangka berpikir (Putra et al., 2024), dapat menganalisis apakah eksistensi dan perolehan suara Partai Aceh di Aceh Tengah pada Pemilu 2024 ditopang oleh kemampuan mereka dalam mengonsolidasikan struktur partai secara konvensional (tatap muka dan ketokohan) serta menyuarakan isu-isu riil masyarakat setempat, atau justru terjebak dalam narasi politik makro yang kurang beresonansi di tingkat lokal.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta organisasi politik dalam memahami perubahan preferensi masyarakat terhadap partai politik lokal. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi penguatan pendidikan politik, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta perumusan pendekatan politik yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat lokal. Bagi Partai Aceh sendiri, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi kelembagaan dan komunikasi politik agar tetap relevan di tengah perubahan orientasi pemilih. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan dasar empiris dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi menurunnya eksistensi partai politik lokal pada tingkat kabupaten. Akibatnya, kebijakan penguatan demokrasi lokal maupun strategi pengembangan partai politik berisiko tidak tepat sasaran, kurang responsif terhadap perubahan perilaku pemilih, dan berpotensi memperlebar jarak antara institusi politik dengan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas representasi politik serta berkurangnya efektivitas partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas partai politik lokal, perilaku pemilih, dan dinamika elektoral di Aceh maupun konteks politik lokal Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai partai politik lokal memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan analisis yang digunakan Kelima penelitian terdahulu yang telah Analisa dapat di temukan gap research yang sangat berbeda yakni penelitian tersebut sama-sama menyoroti peran partai politik lokal di Aceh dalam konteks demokratisasi pasca-konflik, hubungan dengan partai nasional, serta stabilitas politik daerah. Seluruhnya masih berfokus pada tataran makro di tingkat provinsi atau nasional dan belum menelusuri bagaimana dinamika eksistensi partai lokal berlangsung di tingkat kabupaten yang memiliki karakter sosial dan elektoral berbeda khususnya pada mayoritas suku terbesar kedua yang ada di Aceh yaitu suku Gayo. Penelitian (Zulfan et al, 2023) misalnya, membahas kebangkitan dan kemunduran partai lokal dalam konteks demokratisasi pasca-konflik, tetapi tidak menguraikan fenomena pergeseran dukungan serta potensi perpecahan elektoral berbasis identitas kultural yang mulai tampak menjelang Pemilu 2024.

Dalam jurnalnya (Djumadin, 2023) menyoroti strategi sosialisasi partai baru seperti Partai Gelora dalam menantang partai lama di tingkat nasional, namun belum menyentuh dinamika partai lokal yang sudah mapan seperti Partai Aceh. Sementara itu, penelitian (Budiatri, 2022) dan (Janah et al., 2023) menekankan pentingnya partai lokal dalam pelembagaan demokrasi dan persaingan dengan partai nasional, tetapi belum membahas bagaimana kekuatan partai tersebut diuji di daerah dengan konfigurasi politik yang lebih plural seperti Aceh Tengah. Penelitian (Usman et al., 2024) bahkan hanya meneliti eksistensi partai lokal dalam konteks Pilkada Banda Aceh 2017, tanpa menyinggung kontestasi legislatif terbaru yang lebih menampakkan perubahan orientasi politik masyarakat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan

memusatkan kajian pada eksistensi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilu legislatif 2024, yang menjadi periode penting untuk menilai kemampuan adaptasi partai terhadap perubahan perilaku pemilih dan tekanan persaingan dengan partai nasional. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berhenti pada analisis normatif pasca-konflik, penelitian ini menyoroti dimensi adaptasi ideologis, strategi elektoral, dan tantangan eksistensial yang dihadapi partai lokal di wilayah non-basis. Selain itu, penelitian ini mengangkat konteks lokal Aceh Tengah yang lebih heterogen secara sosial dan kultural dibandingkan daerah basis kuat Partai Aceh lainnya, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana kekuatan politik lokal mampu bertahan dalam kondisi kompetisi elektoral yang semakin terbuka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan empiris baru terhadap kajian politik lokal di Aceh, khususnya dalam memahami transformasi partai lokal dari simbol pasca-konflik menjadi Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan secara spesifik oleh penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks objek penelitian, fokus kajian, serta pendekatan analisis yang digunakan. Dari sisi objek penelitian, penelitian ini secara khusus mengkaji eksistensi Partai Aceh pada Pemilihan Umum DPRD Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki karakteristik sosial dan identitas politik berbeda dibanding wilayah basis utama partai politik lokal di Aceh. Dari sisi fokus kajian, penelitian ini tidak hanya melihat eksistensi partai berdasarkan keberadaan formal organisasi, tetapi juga menganalisis eksistensi secara substantif melalui kemampuan mempertahankan dukungan elektoral dan relevansi politik di tengah perubahan perilaku pemilih.

Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk memahami hubungan antara perubahan orientasi pemilih, karakteristik identitas lokal, dan dinamika elektoral kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai keberlangsungan partai politik lokal yang tidak semata-mata ditentukan oleh legitimasi historis, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik masyarakat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai eksistensi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur besarnya pengaruh antar variabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan politik terkait eksistensi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, proses, pengalaman politik, serta dinamika yang melatarbelakangi perubahan dukungan masyarakat terhadap Partai Aceh yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik.

Metode kualitatif digunakan karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan serta menginterpretasikan data. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara naratif berdasarkan fakta lapangan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai eksistensi partai politik lokal dalam konteks politik daerah. Pendekatan induktif dipilih agar kesimpulan yang diperoleh benar-benar dibangun dari fakta empiris yang ditemukan selama penelitian, bukan untuk membuktikan hipotesis tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan para informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi hasil pemilu, arsip kelembagaan, laporan pengawasan pemilu, media massa, serta literatur yang relevan dengan kajian partai politik lokal di Aceh. Penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling dan pada kelompok tertentu menggunakan snowball sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki pengalaman, posisi, serta pengetahuan yang relevan

terhadap fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah (1 orang);
2. Pengurus Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah (1 orang);
3. Anggota legislatif terpilih dari partai nasional hasil Pemilu 2024 (5 orang);
4. Tokoh masyarakat dan tokoh adat (1 orang);
5. Akademisi atau pengamat politik lokal (2 orang);
6. Simpatisan, pemilih Partai Aceh, dan pemilih partai nasional (15 orang).

Total informan penelitian berjumlah 25 orang.

Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam dari sisi penyelenggara pemilu, aktor politik, pengamat, serta masyarakat sebagai pemilih. Informan kunci dalam penelitian ini berasal dari unsur pengurus Partai Aceh dan penyelenggara pemilu karena keduanya memiliki informasi strategis mengenai proses politik, strategi elektoral, serta dinamika yang memengaruhi keberlangsungan eksistensi partai politik lokal di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemilih diperlukan untuk memahami bagaimana persepsi publik terbentuk terhadap Partai Aceh pasca Pemilu 2024.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi lapangan. Pedoman wawancara disusun untuk menggali informasi mengenai strategi Partai Aceh dalam Pemilu 2024, faktor pendukung dan penghambat eksistensi partai, persepsi masyarakat terhadap Partai Aceh, serta evaluasi dari penyelenggara pemilu dan pengamat politik lokal. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik**.** Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus Partai Aceh, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemilih. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi pemilu, observasi lapangan, dan arsip pendukung lainnya untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis induktif yang mengacu pada tahapan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data **(***data display***)**, penarikan kesimpulan, dan triangulasi**.** Data hasil wawancara dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan interpretasi untuk menemukan pola yang menjelaskan eksistensi Partai Aceh pada Pemilu DPRK Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena wilayah ini menjadi kasus yang menarik, di mana Partai Aceh masih memiliki eksistensi formal sebagai partai politik lokal tetapi mengalami penurunan perolehan suara hingga kehilangan seluruh kursi DPRK pada Pemilu 2024. Di sisi lain, wilayah ini juga memiliki karakteristik sosial dan budaya masyarakat Gayo yang berbeda dibanding wilayah pesisir yang selama ini menjadi basis utama Partai Aceh.

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama proses penyusunan skripsi sesuai jadwal akademik tahun 2025–2026 dan mencakup tahapan penyusunan usulan penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis menganalisis eksistensi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Pembahasan difokuskan hanya pada variabel utama penelitian, yaitu eksistensi, sesuai operasional konsep yang telah ditetapkan dalam penelitian. Eksistensi dianalisis melalui dimensi internal (formal/prosedural) dan eksternal (substantif) serta dikaitkan dengan dinamika elektoral yang membentuk keberlangsungan posisi Partai Aceh di Aceh Tengah. Kaitan langsung pada aspek manajemen konflik internal dan adaptasi kelembagaan. Partai Aceh sebagai partai lokal yang dominan tentu tidak luput dari dinamika faksionalisme atau reorganisasi internal menjelang Pemilu 2024. Eksistensi bersifat dinamis, yang berarti suatu keberadaan bisa mengalami pasang surut (degradasi) tergantung pada bagaimana entitas tersebut berinteraksi dengan lingkungannya.(Abidin, 2007). Untuk membedah eksistensi organisasi atau partai politik,

kita dapat merujuk pada beberapa perspektif ahli berikut:

1. Dimensi Internal : Kesisteman (*Systemness*)

Dalam teori institusionalisasi politik, kesisteman (*systemness*) merujuk pada derajat sejauh mana sebuah partai memiliki batas-batas organisasi yang jelas dan struktur internal yang bekerja secara sistematis, bukan sporadis. Partai yang memiliki derajat kesisteman tinggi adalah partai yang digerakkan oleh aturan main (AD/ART), rutinitas kelembagaan, dan prosedur yang disepakati bersama, bukan sekadar digerakkan oleh figur karismatik (tokoh sentral) atau bekerja hanya saat menjelang pemilu saja.

2. Dimensi Eksternal: Penanaman Nilai (*Value Infusion*)

Penanaman nilai (*value infusion*) adalah dimensi eksternal sekaligus ruh dari sebuah institusi politik. Menurut Huntington, sebuah organisasi menjadi institusi ketika ia memiliki nilai pada dirinya sendiri, tidak sekadar menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (kekuasaan). *Value infusion* terjadi ketika anggota, kader, dan simpatisan memiliki ikatan emosional, ideologis, dan identitas yang kuat terhadap partai. Partai dilihat sebagai wadah perjuangan ideologi, bukan sekadar kendaraan politik pragmatis.

3. Dimensi Eksternal: Reifikasi (*Reification*)

Secara sosiologis, reifikasi adalah proses di mana sebuah entitas abstrak (seperti organisasi atau ideologi) berubah wujud menjadi kenyataan objektif yang mapan di benak masyarakat. Dalam membedah eksistensi sebuah entitas politik di tingkat daerah, efektivitas strategi komunikasi dan penguasaan lanskap lokal menjadi penentu utama. Penelitian terdahulu oleh (Putra et al., 2024) mengenai Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batu menunjukkan bahwa tingginya popularitas aktor politik secara makro serta masifnya penggunaan media digital tidak serta-merta berkorelasi positif dengan perolehan suara nyata jika aktor tersebut gagal membangun kedekatan emosional dengan konstituen lokal dan mengabaikan konsolidasi struktural di tingkat akar rumput. Eksistensi partai politik lokal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika regulasi dan tata kelola pemerintahan yang dinamis di tingkat nasional. Studi yang dilakukan oleh (Setiawan & Taebenu, 2025**)** menyoroti bagaimana kebijakan dan kontrol regulasi negara pasca-Reformasi sangat memengaruhi ruang gerak, fungsi, dan keberadaan organisasi serta institusi di tingkat lokal demi menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Eksistensi dan efektivitas sebuah institusi politik di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana dinamika perilaku politik bekerja di dalam ruang pengambilan keputusan. Berdasarkan kajian dari (Lambelanova et al., 2024) mengenai perspektif tata kelola pemerintahan, terdapat lima aspek krusial yang menentukan kualitas dan arah pengambilan keputusan strategis, yaitu peran dan pengaruh pemimpin, pembangunan koalisi, partisipasi masyarakat, hubungan pribadi, serta budaya organisasi yang melingkupinya. Eksistensi institusi politik di tingkat lokal, khususnya dalam momentum elektoral, tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas wilayah melalui keselarasan regulasi dan pengelolaan kondisi keamanan. Berdasarkan kajian dari (Salama et al, 2025) mengenai penyelenggaraan pemilu di daerah dengan karakteristik khusus, efektivitas dan kualitas kontestasi politik sangat dipengaruhi oleh dua pilar utama, yaitu implementasi politik hukum yang adaptif terhadap konteks lokal serta perumusan strategi keamanan yang komprehensif, baik pada dimensi tradisional (pengamanan fisik) maupun non-tradisional (mitigasi konflik sosial dan polarisasi).

Eksistensi partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan salah satu indikator utama yang menentukan tinggi rendahnya derajat desentralisasi asimetrik yang dimiliki daerah tersebut pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Berdasarkan kajian dari (Harahap et al, 2026), keberadaan partai politik lokal memberikan ruang diskresi yang luas bagi masyarakat Aceh untuk merepresentasikan kebutuhan dan menyalurkan aspirasi politiknya secara mandiri melalui mekanisme legislasi yang tersedia, tanpa harus sepenuhnya didominasi oleh partai politik nasional. Kerangka pemikiran mengenai peran partai lokal dalam struktur desentralisasi asimetrik dari (Harahap et al., 2026) ini sangat relevan untuk membedah eksistensi Partai Aceh pada Pemilu DPRD tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai salah satu partai politik lokal yang lahir dari rahim kekhususan otonomi khusus Aceh, Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah memegang peranan krusial sebagai saluran formal dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat di wilayah yang heterogen. Melalui

pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana Partai Aceh mempertahankan eksistensi elektoral dan peran politiknya pada Pemilu 2024, di tengah dinamika tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta tantangan inkonsistensi regulasi nasional yang memengaruhi derajat otonomi khusus di tingkat lokal.

eksistensi substantif (dukungan elektoral dan penerimaan masyarakat)**.** Secara formal, Partai Aceh masih memenuhi seluruh ketentuan sebagai partai politik lokal melalui keberadaan struktur organisasi, kepengurusan, legalitas administratif, serta keikutsertaan dalam tahapan Pemilu 2024. Namun secara substantif, eksistensi tersebut mengalami penurunan yang signifikan karena tidak berhasil dikonversi menjadi dukungan elektoral berupa perolehan kursi legislatif.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penelitian, Partai Aceh tetap menjalankan fungsi organisasi sebagaimana partai politik pada umumnya, mulai dari proses penjaringan calon legislatif, sosialisasi politik, pelaksanaan kampanye, hingga mobilisasi simpatisan selama tahapan pemilu berlangsung. Struktur organisasi partai juga masih menjangkau tingkat kecamatan dan kampung sehingga secara administratif keberadaan partai masih terlihat aktif di wilayah Aceh Tengah. Namun demikian, hasil dokumentasi pemilu menunjukkan bahwa keberadaan organisasi tersebut tidak mampu mempertahankan dukungan masyarakat pada Pemilu DPRK Tahun 2024. Partai Aceh kehilangan seluruh kursinya di DPRK Aceh Tengah meskipun pada periode sebelumnya masih memiliki representasi politik di parlemen daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan formal tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi elektoral. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus mantan pengurus Partai Aceh di Aceh Tengah yang menyatakan bahwa terdapat jarak historis dan identitas antara narasi perjuangan Partai Aceh dengan karakter masyarakat Gayo di dataran tinggi Aceh Tengah. “Secara historis dan sosial, kita memang mengakui adanya ‘jarak’ ideologis. Partai Aceh akar rumputnya masyarakat pesisir. Sedangkan masyarakat Gayo punya pandangan berbeda dan lebih melihat figur serta kemanfaatan nyata daripada sentimen sejarah.” **Hasil wawancara dengan mantan pengurus Partai Aceh Aceh Tengah, 6 Januari 2026.** Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Partai Aceh di Aceh Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan organisasi bertahan secara administratif, tetapi juga oleh kemampuan membangun kedekatan psikologis dengan masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis menemukan bahwa preferensi pemilih di Aceh Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin pragmatis dan berorientasi pada hasil nyata. Isu ekonomi lokal seperti harga kopi, akses produksi pertanian, pembangunan wilayah, dan kapasitas personal calon legislatif lebih dominan dibandingkan narasi identitas politik lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama Partai Aceh. Selain itu, penelitian menemukan bahwa eksistensi Partai Aceh menghadapi tantangan adaptasi terhadap karakteristik sosial masyarakat dataran tinggi. Partai masih membawa narasi historis perjuangan yang cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi agenda politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat agraris Aceh Tengah. Kondisi tersebut menyebabkan partai mengalami kesulitan mempertahankan loyalitas pemilih.

Dari sisi observasi terhadap dinamika kampanye, penulis juga menemukan bahwa kontestasi politik pada Pemilu 2024 semakin dipengaruhi oleh kekuatan figur calon legislatif dibanding identitas partai. Sistem pemilu proporsional terbuka mendorong masyarakat memilih individu yang dinilai mampu memberikan manfaat langsung, memiliki kedekatan sosial, serta sumber daya politik yang lebih kuat. Akibatnya, posisi partai sebagai simbol kolektif mengalami pelemahan dalam memengaruhi keputusan pemilih. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis penelitian, penulis menyimpulkan bahwa eksistensi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan secara formal melalui keberadaan organisasi dan legalitas politik, namun mengalami pelemahan secara substantif karena tidak lagi mampu mengonversi legitimasi historis menjadi dukungan elektoral pada Pemilu DPRK Tahun 2024**.** Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan partai politik lokal di wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan perilaku pemilih dan relevansi program politik yang ditawarkan.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilu DPRD Tahun 2024 masih bertahan secara formal melalui keberadaan organisasi dan legalitas politik, namun mengalami pelemahan secara substantif karena tidak lagi mampu mempertahankan dukungan elektoral masyarakat**.** Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan partai politik lokal pada era demokrasi kontemporer tidak cukup ditentukan oleh legitimasi historis dan keberadaan kelembagaan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan karakteristik pemilih dan kebutuhan masyarakat. Sama halnya dengan temuan penelitian mengenai perkembangan partai politik lokal di Aceh yang menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik pasca konflik tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan elektoral, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan organisasi Partai Aceh yang tetap aktif hingga tingkat lokal ternyata belum mampu menjaga konsistensi dukungan politik masyarakat. Dalam konteks ini, eksistensi partai tidak hanya dimaknai sebagai keberlangsungan struktur organisasi, tetapi juga kemampuan mempertahankan fungsi representasi politik di tengah perubahan preferensi pemilih. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas pergeseran perilaku pemilih menuju pola yang lebih rasional dan pragmatis**,** di mana masyarakat cenderung menilai figur kandidat, rekam jejak, manfaat kebijakan, serta kedekatan sosial dibanding loyalitas terhadap identitas partai. Pada kasus Kabupaten Aceh Tengah, penulis menemukan bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan aspek manfaat konkret dan kedekatan personal dibandingkan narasi historis perjuangan yang selama ini menjadi identitas utama Partai Aceh. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa orientasi pemilih lokal mengalami transformasi dari politik identitas menuju politik berbasis kinerja dan manfaat.

Di sisi lain, temuan penelitian ini berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa dominasi Partai Aceh masih relatif kuat sebagai representasi politik masyarakat Aceh pasca konflik. Perbedaan tersebut muncul karena karakteristik objek penelitian yang berbeda. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada wilayah yang secara historis menjadi basis utama Partai Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki karakter sosial dan identitas politik masyarakat Gayo yang berbeda dengan wilayah pesisir Aceh. Perbedaan karakteristik tersebut menghasilkan dinamika elektoral yang berbeda pula. Temuan penelitian ini juga memperkuat kajian yang menyatakan bahwa identitas lokal tidak selalu menjadi faktor dominan dalam mempertahankan dukungan politik**.** Penulis menemukan bahwa masyarakat Aceh Tengah menunjukkan kecenderungan memilih berdasarkan kedekatan sosial, kapasitas kandidat, serta kemampuan menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa identitas politik lokal yang sebelumnya menjadi modal utama Partai Aceh mulai mengalami penurunan efektivitas sebagai alat mobilisasi politik.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor figur calon legislatif menjadi salah satu elemen yang semakin menentukan perilaku pemilih. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya mengenai meningkatnya personalisasi politik dalam sistem pemilu proporsional terbuka, di mana kandidat memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding identitas partai. Dalam konteks ini, partai politik lokal dituntut untuk tidak hanya mempertahankan simbol historis, tetapi juga membangun kader dan strategi politik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan perspektif bahwa eksistensi partai politik lokal pada era demokrasi saat ini tidak lagi cukup dibangun melalui legitimasi historis dan kekuatan simbolik, melainkan harus ditopang oleh kemampuan adaptasi organisasi, relevansi program politik, dan respons terhadap perubahan perilaku pemilih**.** Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian politik lokal,

khususnya mengenai keberlanjutan partai politik lokal di wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang heterogen.

3.2 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai eksistensi Partai Aceh, penulis juga menemukan beberapa temuan menarik yang muncul selama proses penelitian dan memiliki keterkaitan dengan dinamika politik lokal di Kabupaten Aceh Tengah. Temuan menarik pertama adalah adanya pergeseran orientasi politik masyarakat dari politik identitas menuju politik manfaat (benefit-oriented politics). Masyarakat tidak lagi menjadikan identitas historis atau kedekatan simbolik sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik, tetapi lebih menilai kemampuan aktor politik dalam menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan perubahan pola relasi antara masyarakat dengan partai politik lokal. Temuan menarik berikutnya adalah menguatnya pengaruh figur dibandingkan institusi partai. Dalam praktik elektoral di Aceh Tengah, pemilih menunjukkan kecenderungan memilih calon legislatif berdasarkan kapasitas personal, kedekatan sosial, jaringan lokal, dan kemampuan komunikasi politik dibandingkan loyalitas terhadap partai pengusung. Kondisi tersebut menyebabkan posisi partai sebagai identitas kolektif menjadi relatif melemah.

Penulis juga menemukan bahwa perbedaan karakteristik sosial budaya menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan terhadap partai politik lokal. Kabupaten Aceh Tengah yang didominasi masyarakat Gayo memiliki konstruksi identitas politik yang berbeda dengan wilayah basis tradisional Partai Aceh. Akibatnya, strategi politik yang efektif di wilayah lain belum tentu dapat diterapkan secara langsung di Aceh Tengah tanpa proses adaptasi terhadap konteks lokal. Temuan menarik lainnya adalah bahwa meskipun mengalami penurunan dukungan elektoral, Partai Aceh masih memiliki keberlangsungan organisasi yang relatif terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan elektoral tidak selalu identik dengan hilangnya keberadaan partai secara kelembagaan. Namun apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang tanpa adanya penyesuaian strategi, maka keberlangsungan representasi politik partai lokal berpotensi semakin menurun pada pemilu berikutnya. Secara umum, temuan-temuan tambahan tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik lokal saat ini semakin kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi antara identitas lokal, perubahan perilaku pemilih, personalisasi politik, serta kemampuan partai dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi Partai Aceh sebagai partai politik lokal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan secara formal melalui keberadaan kelembagaan dan keikutsertaan dalam proses demokrasi, namun mengalami pelemahan secara substantif karena tidak mampu mempertahankan dukungan elektoral masyarakat hingga tidak memperoleh kursi pada Pemilu 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan partai politik lokal tidak hanya ditentukan oleh legitimasi historis dan keberadaan organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan partai dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan perilaku pemilih, karakteristik sosial masyarakat, serta relevansi program politik yang ditawarkan kepada publik.

- **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh dinamika eksistensi Partai Aceh pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selain itu, penelitian juga memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian dan ketersediaan data lapangan, khususnya dalam menggali perkembangan preferensi politik masyarakat secara longitudinal sebelum dan sesudah Pemilu 2024.

- **Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)**

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai eksistensi partai politik lokal masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian pada wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda di Provinsi Aceh**,** serta mengembangkan pendekatan komparatif antar partai politik lokal dan partai nasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan perilaku pemilih dan keberlanjutan partai politik lokal di masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah**,** pengurus Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah, para informan penelitian**,** akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh responden yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data hingga penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta seluruh dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2007). *Analisis eksistensial: Sebuah pendekatan alternatif untuk psikologi dan psikiatri*. PT RajaGrafindo Persada.

Budiatri, A. P. (2022). The Impact of Local Parties on Party System Institutionalisation in Post-Conflict Aceh. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/18681034211029035

Djumadin, Z. (2023). Strategy for Socialization of New Political Parties Ahead of the 2024 General Election (Case Study of the Gelora Party). *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*,13(03). SEAN Institute (Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains). https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/3320

Harahap, A. S., Labolo, M., Pitono, A., & Kartiwi. (2026). Derajat Desentralisasi Asimetrik Provinsi Nanggroeh Aceh Darussalam. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/6017

Janah, K., Fatimah, S., & Hariz, H. S. S. (2023). The Role of Aceh Local Parties in The 2024 General Election in Realizing Democratization. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Universitas Malikussaleh (Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi). https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/7532/3313

Lambelanova, R., Saputra, R., & Nurfurkon, A. (2024). How Is Political Behavior In Decision-Making? Organizational Culture Perspective In Governance. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/4335

Manwaring, R., & Foley, E. (2026). A new era of 'minimal social democracy'? Comparing UK Labour under Keir Starmer. *British Politics*. https://doi.org/10.1057/s41293-025-00295-4

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). (2005, 15 Agustus).

Putra, I. M. A. W. W., Luthfi, A., Wibowo, A. P., Rudijanto, J. S. W., & Maharani, D. P. (2024). Dynamics of Political Communication in the 2024 Batu Mayoral Election. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 18(2), 1-19. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/5303

Salama, T. Y., Wenggi, K. R. S., & Uang, D. P. (2025). Implementasi Pilkada Provinsi Papua: Menjaga Stabilitas Melalui Politik Hukum Dan Keamanan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/5579

Setiawan, I., & Taebenu, M. M. (2025). Dinamika Organisasi Kemasyarakatan Dan Reformasi Kebijakan Pemerintahan Yang Demokratis. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/5531/2388

Singh, A. (2026). *Climate Change and the Energy Transition: The Science, Politics, and Solutions for a Sustainable Future* (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003531180

Usman, Ngarawula, B., & Prianto, B. (2024). The Post-Peace Political Dynamics in Aceh Province: The Role and Existence of Local Parties on Banda Aceh's Regional Head Election in 2017, of Indonesia. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 4(1), 88-105. https://www.ijrss.org/index.php/ijrss/article/view/313

Zulfan, Ikramatoun, S., & Aminah. (2023). Aceh Local Political Party: The rise, victory, and decline. *Multidisciplinary Science Journal*, 5, 1-15. https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/download/425/379/3833